

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
JARINGAN PETERNAKAN (SIJINAK)
DALAM PENDEKATAN E-GOVERNMENT
Study Kasus: Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021

By IMANUDDIN IMANUDDIN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JARINGAN PETERNAKAN
(SIJINAK) DALAM PENDEKATAN *E-GOVERNMENT***

Study Kasus: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Sumbawa Tahun 2021

**IMPLEMENTATION OF THE LIVESTOCK NETWORK INFORMATION SYSTEM (SIJINAK)
IN THE CASE STUDY OF THE E-GOVERNMENT APPROACH: THE ANIMAL HUSBANDRY
AND ANIMAL HEALTH OFFICE OF SUMBAWA REGENCY IN 2021**



Oleh :

IMANUDDIN
NIM. 217110011

JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021

BAB I

18

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem penyelenggaraan dalam melayani masyarakat sangat penting demi mencapai pelayanan publik yang efektif dan efisien, dengan adanya perubahan dalam inovasi pelayanan publik itu sendiri. Pemerintah yang sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan sebuah informasi publik demi mencapai pelayanan yang baik dan memuaskan pada masyarakat. Pengetahuan akan teknologi saat ini berkembang sangat baik di lingkungan pemerintahan dan kalangan masyarakat, sehingga akan hal ini mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Di lingkungan pemerintahan untuk melakukan inovasi pelayanan publik untuk masyarakat demi mendapat pelayanan yang baik, dengan adanya *Elektronik Government* (e-government) untuk perubahan pelayanan masyarakat agar mencapai kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang diikuti dengan panduan penyusunan

rencana induk pengembangan *E-Government* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan tujuan *E-Government* untuk membentuk jaringan

komunikasi di antara masyarakat, swasta, dan pemerintahan lainnya untuk mempelancar intraksi, transaksi dan layanan.

⁹ Menurut Indrajit (2002:36) *E-Government* yaitu suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. Sehingga dalam proses pelayanan di pemerintah dengan perkembangan *e-government* mengakibatkan pelayanan berjalan dengan efektif dan efisien, maka setiap daerah mengubah pelayanan publik kepada masyarakatnya dengan perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya ⁵⁹ di beberapa daerah yang ada di Indonesia yaitu Kabupaten Sumbawa Besar yang menerapkan Program *Smart City* Sumbawa.

⁴¹ Kabupaten Sumbawa yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni salah satu daerah yang akan sumber daya alam melimpah terdiri dari beberapa yaitu sektor pertanian, peternakan dan pariwisata. Dilihat dari sektor peternakan yang ada di Sumbawa Besar, yang memiliki populasi ternak yang paling dan meningkat setiap tahunnya. Dengan seiring meningkatkan populasi ternak tersebut, pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar dalam *Smart City* mengeluarkan sebuah inovasi pelayanan kepada masyarakat (peternak) yaitu Sistem Informasi jaringan Peternakan (Sijinak), hadirnya aplikasi ini biasa perbaiki tata kelola peternakan untuk yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Kabupaten Sumbawa melakukan perubahan pelayanan demi terwujudnya pemerintah yang transparansi dan akuntabilitas dalam keterbukan informasi publik. Munculnya sebuah sistem ini, dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor.91 Tahun 2018, tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Sumbawa adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi di daerah.

Smart City Sumbawa – memantapkan pelaksanaan registrasi ternak secara elektronik, bertempat diruang Kadis Kominfotik Kabupaten Sumbawa dalam pengembangan aplikasi SIJINAK (Sistem Informasi Jaringan Peternakan) pada Jum,at 27 September 2019 yang lalu. Pada pertemuan tersebut. Sistem operasi aplikasi Sijinak masih dibedah untuk mengetahui sejauh mana progres pengembangan dari aplikasi ini karena aplikasi Sijinak yang nantinya bisa diakses oleh publik dengan penguatan sistem database “ternak” dan “pemilik ternak” yang akan dioperasionalkan melalui secara *online* dengan output Kartu Ternak yang sudah terhubung dengan server database peternakan (Dikutip dari *Smart City Sumbawa*, 01 Oktober 2019).

³ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar berharap dengan adanya Sistem Informasi Jaringan Peternakan (Sijinak) dapat mendukung Program *Smart City* Sumbawa, yang dimana terlaksananya system Sijinak dalam mengelola data ternak di Sumbawa. Dengan demikian, aplikasi Sijinak yang belum bisa di akses oleh publik sebab itu aplikasi ini memiliki

permasalahan dalam pelaksanaan karena aplikasi Sijinak ini nantinya akan membantu kegiatan peternakan dari hulu ke hilir di dalam sistem Sijinak dengan penguatan sistem database “ternak” dan “pemilik ternak” yang akan dioperasikan melalui system informasi jaringan peternakan, dengan melalui kartu ternak yang sudah memiliki barcode generator yang terhubung dengan server database peternakan.

Oleh karena itu, sebuah program yang baru pasti memiliki kekurangan di dalam pelaksanaannya dalam mengelola data peternakan yang ada di Kabupaten Sumbawa besar, yang dimana permasalahan itu dapat berupa sumber daya manusia yang kurang menguasai teknologi yang ada di dinas tersebut dalam mengelola sistem Sijinak itu sendiri, kerjasama antara organisasi yang mendukung dalam keamanan data ternak dan sarana prasarana berupa teknologi informasi yang kurang memadai dalam pelaksanaan system tersebut. Selain itu, permasalahan diatas tentunya partisipasi masyarakat (peternak) untuk mendukung pelaksanaan sistem Sijinak. Maka dari situ, saya mengambil judul skripsi ini ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pemanfaatan teknologi dengan pendekatan *E-Government* di dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang ingin mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pendekatan *e-government* di dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pendekatan *e-government* di dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pendekatan *e-government* di dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa.
2. Untuk mengetahui factor penghambat dalam implementasi sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pendekatan *e-government* di dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan studi pada program Studi Administrasi Publik dalam meraih gelar sarjana (S-1)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam memperkaya ilmu wawasan dari konsep dan praktek perkembangan *e-government* di dalam ilmu administrasi Publik dan implementasi kebijakan social.

3. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik melalui pelaksanaan sistem Sijinak untuk peternakan di kabupaten sumbawa besar.

46

BAB II

KAJIAN PUSAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini saya memaparkan penelitian terdahulu secara sistematis yang tujuan untuk mendukung kelengkapan penelitian saya dalam menganalisis persoalan dan memilih konsep-konsep teori dari penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini, yang dimana penelitian saya yang mengacu pada

penerapan *E-Government* sebagai pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metodelogi	Hasil Penelitian
1	Wilda Maulani, 2020	Penerapan Elektronik Government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (Study kasus program E-health di Kota Surabaya).	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan manfaat sebuah Program E-Health dalam penerapan E-government, yang dimana aplikasi E-Health adalah aplikasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang dikembangkan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan untuk masyarakat di puskesmas dan rumah sakit Kota Surabaya. • Point pendukung dalam penelitian terdahulu pertama persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dimana sama-sama melakukan penelitian yang terkait dengan penerapan elektronik government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan terdapat jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya terdapat pada
2	Yohanes Payong, 2019	Kesiapan Impementasi E-Government Menuju Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Kupang.	Kuantitatif dan Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan dari sekian banyaknya aplikasi bersifat offline dan online yang digunakan dalam mengakses data dan informasi yang masih kurang di maafaatkan oleh

				<p>masyarakat di Kota Kupang. Dengan alasan tersebut implementasi e-government di Kota Kupang perlu mengevaluasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point pendukung dalam penelitian ini memiliki persamaan yang dimana implementasi kesiapan e-government dalam perubahan inovasi sistem daerah yang ada di kota kupang dengan persiapan melaksanakan e-government. Point perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan deskriptif.
3	Muhlis Zainuddin, 2019	<p>25</p> <p>Efektivitas Penerapan E-Government di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.</p>	Kuantitatif dan Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan pentingnya menerapkan e-government dalam pelayanan di pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel sebab kabupaten Mamuju belum efektif karena sumber daya manusia (SDM) yang masing kurang dalam bidang Information Technology (IT) yang menjadi hambatan dalam terlaksananya penerapan e-government di kabupaten Mamuju. Penelitian ini menjelaskan pentingnya menerapkan e-government dalam pelayanan di pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan

				<p>yang efektif, efisien dan akuntabel sebab kabupaten Mamuju ²⁵ m efektif karna sumber daya manusia (SDM) yang masing kurang dalam bidang Information Technology (IT) yang menjadi hambatan dalam terlaksana nya penerapan e-government di kabupaten Mamuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point pendukung dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu dalam penerapan e-government dilihat dari efektivitas dari pelaksanaan dalam pelayanan pubik di kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, jenis metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif dan deskriptif. Dilihat dari perbedaannya terdapat point yang ingin diteliti dari efektivitas penerapan e-government ²⁴ sendiri.
4	Haura ²¹ Atthahara, 2018	Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Study kasus Apikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta.	Deskriptif dan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat baik pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau e-government, lahirnya aplikasi Ogan Lopian di kabupaten Purwakarta ²⁹ mbantu proses pelayanan bagi masyarakat di dalam bidang kesehatan, keamanan, laporan pengaduan masyarakat dan lowongan pekerjaan.

				<ul style="list-style-type: none"> Point pendukung dalam penelitian terdahulu yang ke empat ini terdapat persamaannya ²⁹ u menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis e-government dengan membuat sebuah aplikasi untuk masyarakat yang akan membantu peneliti dalam sejauh mana penerapan e-government dan metode yang digunakan yaitu deskriptif dan kualitatif. Point perbedaan dari penelitian ini terletak dari pengembangan sebuah aplikasi yang berbeda untuk masyarakat dalam pelayanan publik itu sendiri.
5	Nur Hidyati, 2016	³⁵ E-Government Dalam Pelayanan Publik (Study Kasus tentang Faktor-faktor Penghambat Inovasi layanan E-Samsat Jatim di Kabupaten Gresik).	Deskriptif dan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian ini menjelaskan tujuan layanan e-Samsat Jatim, ²⁸ u memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada Wajib Pajak, akan tetapi hasil penelitian ini menemukan permasalahan berupa faktor-faktor keberhasilan layanan e-Samsat Jatim. Point pendukung dalam penelitian terdahulu ke lima ini terdapat persamaan yaitu penggunaan e-government dalam pelayanan publik dengan inovasi layanan E-Samsat. Point perbedaan dari penelitian ini dilihat dari study kasus faktor-

				faktor penghambat inovasi layanan E-Samsat dengan pemanfaatan e-government dan beberapa point lainnya yang ingin diteliti.
--	--	--	--	--

¹ 2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Implementasi

Membicarakan tentang **implementasi** tidak lepas dari **sebuah kebijakan publik** itu sendiri, yang di mana implemtasi kebijakan dapat menunjukkan sebuah aktivitas dalam penyelenggraan pemerintah maupun organisasi swasta dalam menentukan kebijakan. ¹⁹ Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Selepas dari situ, **kebijakan publik** menunjukkan suatu implementasi untuk berjalannya sebuah tujuan yang telah ditentukan. Implementasi ¹⁷ **kebijakan merupakan alat administrasi hukum** dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkerja **bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan** (Winarno, 2005:101).

Dalam pelaksanaan atau **implementasi** memiliki hambatan-hambatan **yang** di mana sasaran dan tujuan tidak akan ²⁹ **berjalan dengan baik yang di** pengaruhi **oleh** beberapa factor dalam pengimplementasi sebuah kebijakan atau program tersebut faktor-faktor tersebut bisa berupa sumber daya yang kurang, dukungan organisasi dan

komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam menjalankan kebijakan publik.

Perkembangan implementasi kebijakan dalam menentukan keberhasilan sebuah program atau sasaran untuk mencapai tujuan bersama, implementasi memiliki banyak model-model implementasi untuk menganalisis suatu permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah demi terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan publik, perlunya sebuah model kebijakan atau konsep ² implementasi kebijakan. Sehingga terdapat banyak model implementasi yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan yaitu model implementasi oleh George Edwards ¹ III dalam Widodo (2011:96) terdapat empat factor yang memepengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan berpandangan bahwa implementasi kebijakan yaitu:

a. Komunikasi

¹³ Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan public menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan

untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai dengan yang diharapkan.

b. Sumber saya

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa factor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang di maksudkan berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor bersikap baik maka kebijakan tersebut berjalan dengan baik dengan tujuan yang diinginkan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. **Struktur Birokrasi**

Dilihat dari struktur birokrasi implementasi kebijakan menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi”. Dalam struktur birokrasi memiliki aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Aspek dari struktur birokrasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melembahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan dalam Edward III memiliki empat factor keberhasilan sebuah kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selain itu, terdapat banyak model-model implementasi kebijakan yang menentukan keberhasilan kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut:

1. **Model Van meter dan Van Horn**

Model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Tachjan, 2006:39-40) yang disebut sebagai

A Model of the Policy Implementation Process. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan.
- b. Sumber daya.
- c. Karakteristik organisasi pelaksana.
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- e. Sikap para pelaksana.
- f. Lingkungan social, ekonomi, dan politik.

2. Model Merilee S. Grindle

Model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (dalam Tachjan, 2006:55-56), kerangka pemikirannya berdasarkan jawaban atas dua pertanyaan pokok, khususnya di Negara berkembang, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut, yaitu:

Content dan Context.

- Content of Policy, mencakup:
 - a. Interest affected
 - b. Type of benefits
 - c. Extent of change envisioned
 - d. Site of decision making

- e. Program implementor
- f. Resources committed
- Context of implementation, mencakup:
 - a. Power, interest, and strategies of actor involves
 - b. Institution and regime characteristics
 - c. Compliance and responsiveness

3. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang disebut *A Frame Work for Implementations Analysis* (dalam Tachjan, 2006:57-60), menurut kerangka pemikiran ini, variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada kesekuruhan proses implementasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, sebagai berikut:

- a. Tractability of the problem.
- b. Ability of policy decision to structure implementation.
- c. Nonstatory variabel affecting implementation.

Maksud dari ketiga kategori variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap/dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.

3. Pengaruh langsung berbagai variabel yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

4. Model Hoogewerf (1978)

Model yang ¹² dikemukakan oleh Hoogewerf (dalam Tachjan, 2006:42-43), menurut Hoogewerf sebab musabab yang mungkin menjadi dasar dari kegagalan implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda satu sama lain. Sebab-musabab ini ada sangkut-pautnya berturut-turut dengan isi (content) dari kebijakan yang harus diimplementasi, tingkat informasi dari actor-actor yang terlibat pada implementasi, banyaknya dukungan bagi kebijakan yang harus diimplementasikan dan akhirnya pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan seterusnya).

5. Model Rippley dan Franklin ¹⁴

Menurut Rippley dan Franklin (dalam Subarsono, 2005:99) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga factor, yaitu:

1. Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.

3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.

63

2.2.2. Konsep Elektronik Government (E-Government)

a. Pengertian E-Government

Perkembangan *E-Government* memberikan perubahan inovasi pelayanan yang baru kepada masyarakat untuk menciptakan proses pelayanan publik efektif dan efisien, agar paradigma kualitas pelayanan publik berjalan secara transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan pelayanan publik memanfaatkan *E-Government* berupa teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu sistem penyelenggaraan pemerintah untuk berintraksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien demi terwujudnya pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik sangat dibutuhkan demi terwujudnya pemerintah yang baik. Menurut *The World Bank Group* (dalam Falih Suaedi & Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* adalah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Adanya aturan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan *e-government* disetiap daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hadirnya sebuah

peraturan atau perundangan yaitu Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003¹⁶ tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* menjadikan bahwa *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* penataan manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Di dalam penerapan *e-government* perlunya sumber daya manusia⁷⁸ (SDA) karena salah satu factor utama yang turut menentukan pengembangan atau pengelola maupun penggunaan *e-government*⁵⁴ menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan *e-government* itu sendiri, dengan memiliki kualitas sumber daya yang produktif untuk melaksanakan sebuah pelayanan yang baik kepada masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang baik (*Good governance*).³ Oleh karena itu, pemerintah dalam mendukung penerapan *e-government* harus meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang agar tercapainya pelayanan publik efektif dan efisien.³ Sehingga perlunya pemerintah memberikan informasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar dengan mudah mendapatkan informasi publik secara transparansi dan akuntabilitas.

Sehingga kerangka arsitektur *e-government* untuk menjamin pelayanan public yang efektif dan efisien, dengan keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam pelayanan public yang transparansi, dapat dilihat dari empat struktur tersebut:

1. Akses, yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.
2. Portal pelayanan publik, yaitu situs-situs penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, yaitu organisasi pendukung (*back-office*) yang mengelola, menyediakan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua prasarana baik berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. Baik antar *back-office* portal pelayanan publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya.

b. Manfaat E-Government

Dilihat dari perkembangan *e-government* memiliki banyak manfaat dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk

menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Menurut ²Misuraca (2007:57-57) sebagaimana dari skripsi Ainun Azwaria tahun 2013, yaitu dimensi ekonomi, sosial dan pemerintahan.

1. Dimensi ekonomi

Manfaat *e-government* bagi kegiatan ekonomi yaitu mengurangi biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih baik dengan target pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi permasalahan isu-isu kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

2. Dimensi sosial

Dalam kegiatan sosial, manfaat *e-government* begitu banyak mulai dari penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, penargetan yang lebih baik atas pelayanan pemerintah, peningkatan kapasitas dalam penyediaan keselamatan dan keamanan. Dan juga dalam pelayanan keuangan di pemerintahan.

3. Dimensi pemerintah

Dalam hal pemerintahan, ³²manfaat *e-government* itu sendiri memiliki banyak manfaat dalam dapat meningkatkan pelayanan publik untuk tercapainya *good governance* yang berupa kegiatan dalam ²peningkatan keterbukaan informasi, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan dengan

pemerintahan yang konvensional. Dengan kata lain, manfaat bagi pemerintah ¹⁷ *e-government* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung sistem demokrasi yang ada dalam meningkatkan pelayanan publik dari pemerintah.

c. Intruksi Presiden no. 3 Tahun 2003

Inpres No. 3 Tahun 2003 merupakan intruksi presiden yang dikeluarkan pada tahun 2003 di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Inpres ini dikeluarkan dengan alasan ³ untuk meningkatkan pelayanan publik dari pemerintah untuk masyarakat agar mencapai pelayanan yang efektif dan efisien dalam mencapai ⁴³ Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* di Indonesia. Inpres No. 3 Tahun 2003, memiliki beberapa poin penting ⁸⁴ dalam penerapan e-government, yaitu:

1) ³ Tujuan pengembangan E-Government

Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dengan pengembangan *E-Government* dalam menata sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi ² yaitu:

- a) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah bagi masyarakat di seluruh wilayah negara.

8
Untuk melaksanakan pengembangan *E-Government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:

- a) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas dan juga dapat terjangkau di seluruh wilayah di Indonesia saat ini.
- b) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha agar meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog politik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

2) Pemerintah yang diharapkan

² Pemerintahan menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Dalam hal ini, Pemerintah harus memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakatnya yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu:

- a) Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.
- b) Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar oleh pemerintah dengan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan negara.

3) Strategi pengembangan E-Government

Percapaian tujuan strategis E-government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu:

- a) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat.
- b) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal

- d) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e) Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
- f) Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

4) Pengembangan E-Government

Dilihat dari sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *E-government* dapat dilaksanakan 4 (empat) tingkatan, yaitu:

a) Tingkat 1 - persiapan :

- Pembuatan situs informasi di setiap lembaga.
- Penyiapan SDM (sumber daya manusia)
- Penyiapan sarana akses yang mudah seperti sarana *multipurpose community center, warnet, SME-center*.
- Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.

b) Tingkat 2 – pematangan :

- Pembuatan situs informasi publik interaktif.

- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

c) Tingkat 3 – pematapan :

- Pembuatan situs transaksi pelayanan publik.
- Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

d) Tingkat 4 – pemanfaatan :

- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.
- Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat – 4.
- Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan mengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan namun juga menghilangkan kepercayaan masyarakat.

2.2.3. Sistem Informasi jaringan Peternakan (Sijinak)

Sistem Informasi Jaringan Peternakan atau disebut Sijinak, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengelola dan

memantau pertumbuhan populasi ternak dengan memanfaatkan sistem Sijinak. Menurut Surjarwo, Inovator ³ dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) untuk memperpendek rantai birokrasi ternak keluar daerah.

Sijinak adalah sistem informasi jaringan peternakan Kabupaten Sumbawa yang terpadu. Sistem ini berbasis web untuk memfasilitasi kearifan lokal masyarakat Sumbawa dalam budidaya ternak (sapi, kerbau dan kuda) dengan mengumpulkan data ternak dan pemilik ternak melalui registrasi ternak secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, dapat diakses, laporan sesuai kebutuhan. Dalam sistem Sijinak dapat menghubungkan data populasi ternak dengan berbagai bidang penanganan pengelolaan ternak secara otomatis. Sistem Sijinak ini mendukung dalam pengelohan data ternak dan pemilik ternak yang mengatur tentang berbagai kegiatan yaitu e-Registrasi Ternak, e-Vaksinasi Ternak, e-Perizinan Pengeluaran Ternak, e-Money pelaku Usaha Ternak dan e-Bantuan Ternak.

Perkembangan *e-government* disetiap daerah yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan ⁵⁸ teknologi informasi dan komunikasi di dalam pelayanan publik agar terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien. Pemerintah kabupaten Sumbawa mulai menerapkan pelayanan *e-government* untuk mempermudah pelayanan publik, dengan adanya peraturan atau undang-undang yaitu ⁷² Peraturan Bupati Sumbawa Nomor.

91 Tahun 2018 tentang *Masterplan Smart City Kabupaten Sumbawa* Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi di daerah. Adanya *Smart City Sumbawa* yang dimana mampu mengintegrasikan tiga kepentingan yaitu masyarakat (peternak), pemerintah dan dunia usaha.

Oleh karena itu, sistem Sijinak akan mampu mengelola teknologi pakan ternak bagi masyarakat peternak agar meningkatkan kualitas ternak yang lebih baik, dan juga bagi pemerintah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dunia usaha dalam kualitas jual ternak yang lebih baik.

Adapun sistem Sijinak ini mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (peternak) dengan pembuatan kartu ternak secara elektronik, dengan mengakses melalui sistem Sijinak. Sehingga pemanfaatan sistem Sijinak ini akan mampu berperan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Sumbawa Besar.

2.2.4. Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sijinak

Aplikasi ini merupakan aplikasi pengumpulan data berbasis website yang dapat di akses secara online melalui laman website <http://sijinakhub.sumbawakab.go.id> dengan menggunakan browser pada computer atau perangkat mobile lain yang nantinya dapat terhubung ke internet.

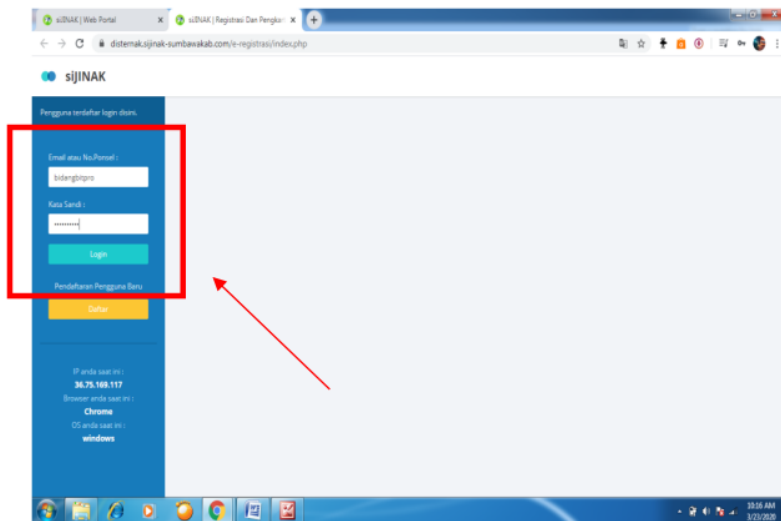
Gambar 2.2.5 Tampilan Awal Website SIJINAK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa 2021

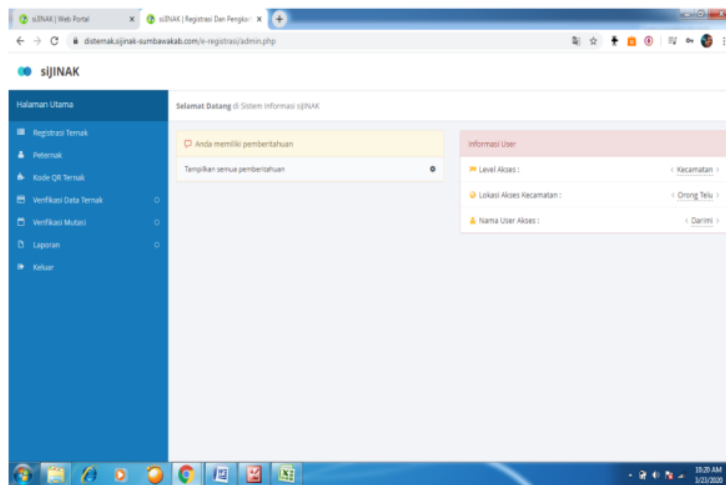
Gambar diatas adalah tampilan awal ketika membuka aplikasi ini. Pada halaman tersebut terdapat beberapa pilihan menu yaitu : E-Registrasi dan Pengkartuan Ternak, E-Izin Pengeluaran Ternak, E-Pelayanan Kesehatan Hewan, E-RPH R, E- Pasar Ternak, E Bantuan Ternak, E-Lar E, E-UPT Prokeswan.

Dalam operasionalnya tentang cara operasional E-Registrasi dan Pengkartuan Ternak seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Untuk login masukan user id dan password seperti gambar di atas. Jika login berhasil maka akan diarahkan seperti gambar dibawah ini, dan pilih kabupaten serta kecamatan.

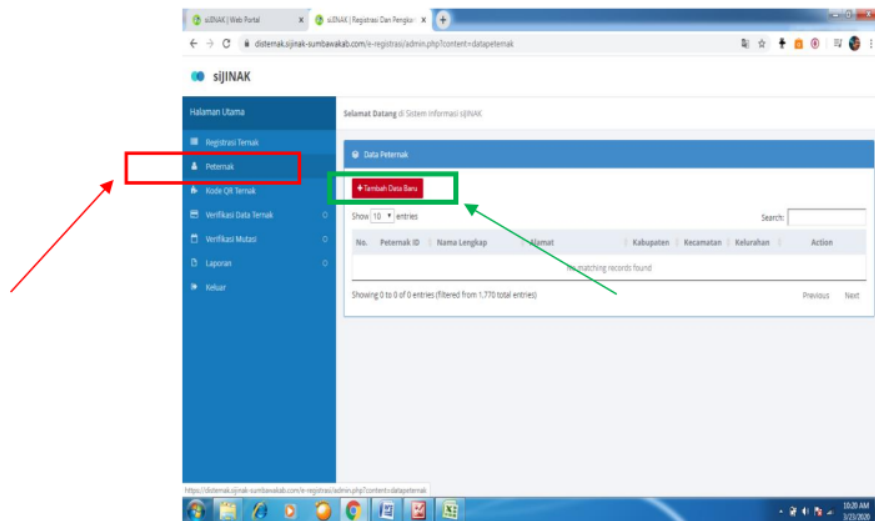
Jika proses login tersebut berhasil maka langsung diarahkan pada halaman utama atau dashboard sijinak.



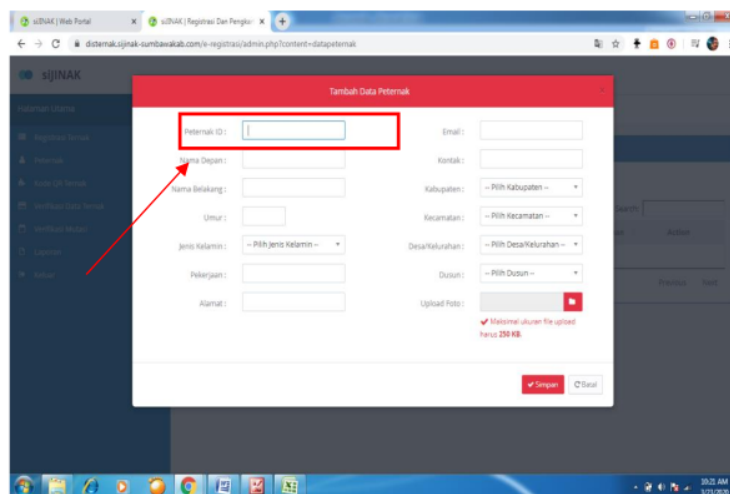
Pada halaman utama diatas terlihat ada beberapa menu pilihan untuk melakukan registrasi ternak. Untuk melakukan registrasi ternak secara online, pada prinsipnya sama dengan registrasi yang dilakukan secara manual. Berikut langkah – langkah untuk melakukan registrasi ternak secara online pada aplikasi siJinak.

1. Pendaftaran Peternak.

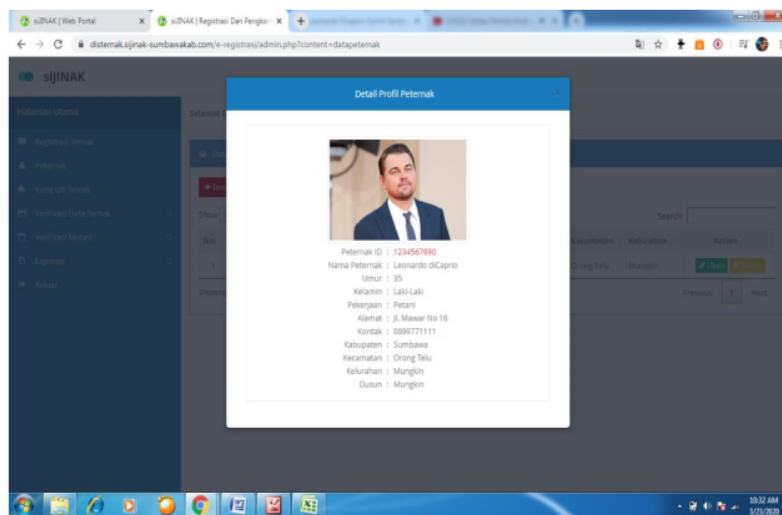
Langkah pertama untuk melakukan registrasi ternak yaitu dengan melakukan pendaftaran peternak dengan cara klik menu peternak. Maka akan terlihat seperti gambar dibawah ini, selanjutnya klik menu tambah baru.



Menu tambah baru adalah menu untuk mendaftarkan peternak pada aplikasi E-Registrasi yang berisi kolom biodata peternak yang lengkap serta berisi nomor KTP peternak sehingga kecil kemungkinan terjadi double data peternak. Berikut gambar menu tambah data peternak.



Input setiap kolom biodata peternak dan pastikan biodata telah terisi dengan benar lalu klik tombol simpan. Untuk kolom **peternak ID** diisi dengan nomor KTP peternak. Perlu diperhatikan bahwa nomor KTP tidak boleh salah, karena jika sudah tersimpan nomor tersebut tidak akan bisa diubah kembali dan kita harus menghapus data tersebut lalu dibuat ulang lagi.



Cek kembali data-data peternak yang telah diinput, jika masih ada kesalahan, dikoreksi dengan cara klik ubah. Jika kesalahan terdapat pada Peternak ID atau nomor KTP maka klik hapus dan ulang proses pendaftaran peternak.

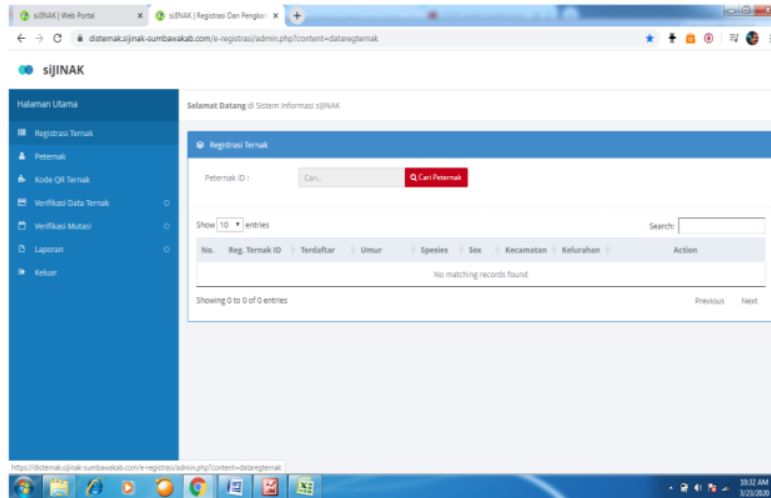
20

No.	Peternak ID	Nama Lengkap	Alamat	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Action
1	123456789	leonardo dicaprio	dfsdf	Sumbawa	Orong Telu	Mungkin	Ubah Hapus

2. Registrasi ternak

20

Registrasi adalah kegiatan pendaftaran pemilikan ternak dengan pembacaan dan pencatatan sidik ternak dalam buku induk dan kartu ternak yang bertujuan untuk mendapatkan data populasi dan struktur populasi. Dalam hal ini registrasi ternak tidak dilakukan dalam buku induk tetapi melalui aplikasi e-registrasi. Melalui e-registrasi diharapkan kegiatan registrasi dapat berjalan dengan efektif, efisien serta mendapatkan data baku populasi ternak yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu arah kebijakan peternakan pada Kabupaten Sumbawa.



Untuk melakukan registrasi ternak, klik pilihan Registrasi pada menu utama, selanjutnya cari peternak yang akan diregistrasi ternaknya dengan cara klik tombol merah cari peternak maka akan keluar daftar peternak yang telah didaftarkan seperti yg terlihat pada gambar dibawah ini.

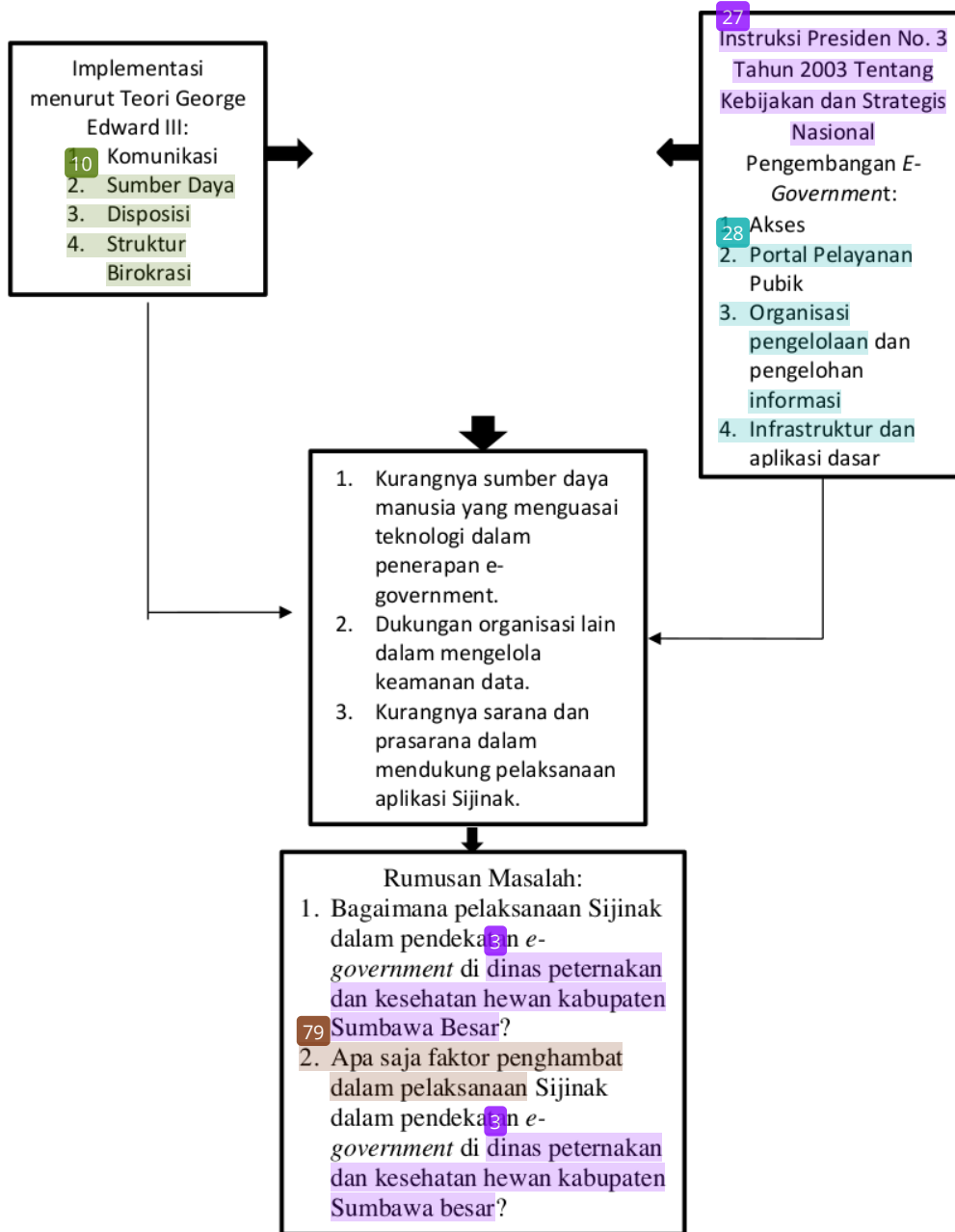
Data Peternak						
No.	Peternak ID	Nama Lengkap	Alamat	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan
1	520405608820001	amaq idi	jurandalas	Sumbawa	Alas	Jurandalas
2	5204054602620001	Siti Aminah	jurandalas	Sumbawa	Alas	Jurandalas
3	5204054407970001	Rohaini Rohaini	jurandalas	Sumbawa	Alas	Jurandalas
4	520405420180002	Siti Aminah	jurandalas	Sumbawa	Alas	Jurandalas
5	5204054201800002	Siti Aminah	jurandalas	Sumbawa	Alas	Jurandalas
6	5204054107800061	Sumnah sumnah	jurandalas	Sumbawa	Alas	Jurandalas
7	520405407630075	ramli kardi	jurandalas	Sumbawa	Alas	Jurandalas
8	5204052306770001	Amaq Safwan	jurandalas	Sumbawa	Alas	Jurandalas
9	5204052110730001	Harin Hasan	jurandalas	Sumbawa	Alas	Jurandalas
10	5204051503900002	Haerul Anwar	jurandalas	Sumbawa	Alas	Jurandalas

Showing 1 to 10 of 66 entries (filtered from 2,131 total entries) Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

Selanjutnya cari nama peternak yang akan di registrasi ternaknya, klik dan isi identitas ternak ternak sesuai dengan ternaknya, dari data tersebut dapat dilihat semua data ternak yang ada di Kabupaten Sumbawa Besar tersimpan dalam Sistem Informasi Jaringan Peternakan agar terjamin keamanan data ternak dan pemilik ternak.

2.3. Kerangka Berpikir

SIJINAK
Perbup. Sumbawa No. 52 Tahun
2019
(Standar Operasional Prosedur
Aplikasi SIJINAK)
1. Registrasi Ternak
2. Registrasi Peternak



METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Maka dari itu, penelitian kualitatif akan membantu peneliti untuk memecahkan ⁷⁵ permasalahan yang ingin diselesaikan untuk mendapatkan hasil yang telah di paparkan di latar belakang tersebut dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian saya dalam pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) di ²³ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa jalan Dr. Wahiddin No. 25 Sumbawa besar. Tujuan mengambil lokasi ini karena pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) di laksanakan oleh dinas tersebut untuk mengelola perkembangan

peternakan yang ada di Kabupaten Sumbawa Besar dan sejauh mana sistem Sijinak dalam penggunaannya. Oleh karena itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Besar sebagai lokasi penelitian bagi peneliti untuk mendapatkan data-data dokumen dan informasi yang terkait dalam permasalahan dari pelaksanaan sistem Sijinak dan sistem Sijinak ini merupakan sistem yang mengatur tentang permasalahan peternakan yang di Kabupaten Sumbawa sehingga untuk melihat keberhasilan dari sistem Sijinak.

3.3 Pemilihan informan / Narasumber

Pemilihan informan atau narasumber dalam penelitian ini, peneliti harus memilih orang yang sangat tahu tentang pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) untuk mengetahui pelaksanaan sistem tersebut yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar.

Berdasarkan penjelasan di atas informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Satria Utama, S.Pt, M.Si sebagai Kasubbag Umum dan Perencanaan dan Pelaporan.
2. bapak Fery Anggriawan, S.pt.
3. bapak Abdul Munir.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni :

1. Data Primer : data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan.

Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan. Data primer dalam bentuk data Peraturan Bupati tentang SOP SIJINAK dan dokumen lainnya yang diperoleh di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar.

2. Data Sekunder : yaitu pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data yang diperoleh berupa dokumen, rekaman wawancara dan dokumentasi berupa foto-foto wawancara. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara observasi langsung di kantor dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2011:157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya. Jadi, dalam penelitian ini saya akan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data dengan tiga teknik yaitu, sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Cartwright dalam Sugiyono (2014:131), observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah mengamati secara langsung.

Dengan menggunakan teknik observasi saya akan turun ke lapangan dengan melihat dan mengamati langsung para petugas dinas peternakan dan kesehatan hewan dalam mendata “ternak” dan “pemilik ternak” yang nantinya pelaksanaan sistem

informasi jaringan peternakan (Sijinak), mengamati cara kerja dari Sijinak dalam mendata ternak dengan cara yang baru.

¹
b. Wawancara

Menurut Stewart & Cash dalam Sugiyono (2012: 118), wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.

⁷⁴
Dalam penelitian ini selain teknik observasi akan menggunakan teknik wawancara, yang dimana akan menyiapkan pertanyaan terkait permasalahan yang ingin di teliti dari sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pendataan baru di dinas peternakan dan kesehatan hewan. Pemilihan responden dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan yang di dinas peternakan kabupaten Sumbawa Besar. Sehingga ¹ hasil yang diharapkan dari wawancara dengan para informan dapat menjadi sebuah data yang akurat yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 143), dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini data dokumentasi menjadi bahas pendukung untuk memperkuat penelitian hasil peneliti saya terkait pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan, ¹ diantaranya dokumen berupa peraturan perundang-undangan,

laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1 3.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh guna menghasilkan data yang akurat dari obyek yang diteliti kemudian di paparkan sesuai dengan kondisi dan waktu. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

1 Menurut Miles and huberman dalam Sugiyono (2015:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengambil data pokok, mengorganisir data kasar yang diperoleh dari lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum

memiliki pola, justru itulah yang harus di jadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam mereduksi data dapat didiskusikan pada teman atau orang lain yang di anggap ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang dimiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Mereduksi data dapat dilakukan dengan cara hasil catatan di lapangan yang banyak dan belum bermakna. Catatan lapangan berupa huruf besar dan kecil, angka dan symbol-simbol yang masih semrawut, yang tidak dapat dipahami. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting yang di ilustrasikan dalam bentuk simbol-simbol dan lain-lain dibuang, karena dianggap tidak penting.

b. Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (Penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:91) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matrik atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi yang demikian ini akan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, maka mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang dipahami tersebut disarankan, selain teks naratif dalam penyajian data bisa menggunakan grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan Chart.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah pengumpulan data, Peneliti mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu kedalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan, dari data yang terkumpul kemudian dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya dan di bandingkan antara satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan.

3.7 Teknik Validitas Data

Validitas data merupakan standar keabsahan dari data yang diperoleh. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moleong (2011: 324) terdapat empat kriteria keabsahan data yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain:

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam (Moleong, 2011: 330) membedakan empat

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, teori. Dalam penelitian ini, peneliti ini melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar yang mengetahui tentang pelaksanaan system jaringan informasi peternakan (Sijinak). Selain itu, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi.

3. Kecukupan Referensial

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan-bahan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

4. Keteralihan (Transferability)

Pengujian transferability atau keteralihan data berkenaan dengan hingga mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan system jaringan informasi peternakan (Sijinak).

5. Kebergantungan (Dependability)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkuantitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti ini perlu diuji

dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing.

6. **Kepastian** (Confirmability)

Menguji kepastian data (Confirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

24 4.1.1 Profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa

31
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Organisasi Perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten sumbawa Nomor. 12 Tahun 2016 tentang pembentukan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Sumbawa 20 Nomor. 75 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

Selanjutnya dari proses pelayanan dalam meningkatkan pertumbuhan peternakan yang ada di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat dari sejarah dan daya dukung atas potensi peternakan yang di miliki Kabupaten Sumbawa. Pelayanan pemerintah bagi masyarakatnya agar berjalan dengan maksimal dengan memanfaatkan teknologi komunikasi pada saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa sangatlah efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan peternakan yang ada di daerah sumbawa besar. Sehingga untuk melakukan pelayanan tersebut, maka tugas pokok dari 15 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu “melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dalam 67 menyelenggarakan standar pelayanan publik untuk memberikan acuan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

- 18
- a. Penyusunan perencanaan bidang Peternakan dan Kesehatan ewan.
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan.

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan, budi daya ternak, pakan dan pola kawasan, serta kelembagaan dan agribisnis peternakan.

15 e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas.

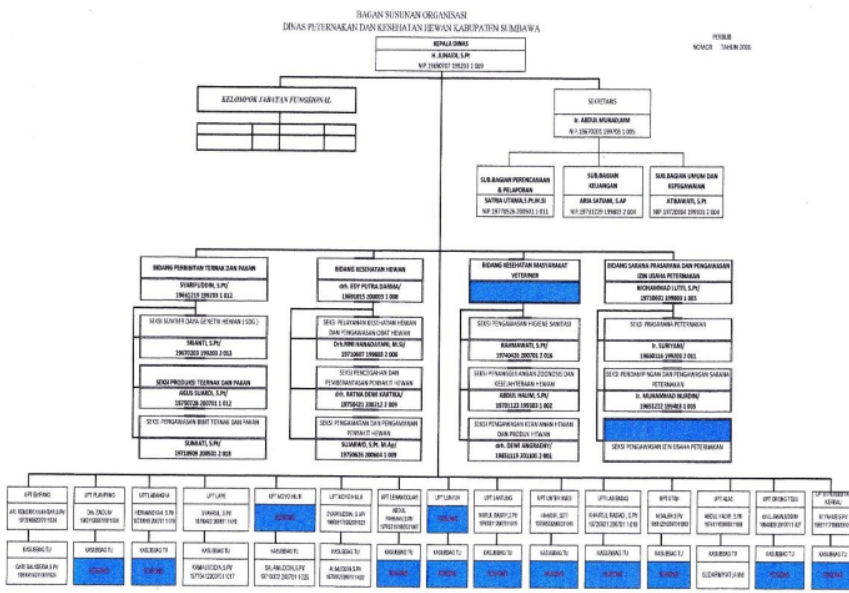
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

24 Untuk standar pelayanan yang ada di Dinas Peternakan Hewan Kabupaten Sumbawa
28 sesuai dari tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Registrasi dan pengkartuan ternak.
2. Pelayanan kesehatan hewan.
3. Penerbitan surat visum.
4. Berita acara kematian ternak.
5. Inseminasi buatan.
6. Pemeriksaan kebuntingan dan penanganan kelahiran ternak.
7. Surat keterangan membawa ternak dalam wilayah kabupaten sumbawa.
8. Mutasi jual beli ternak.
9. Rekomendasi usaha ternak.
10. Rekomendasi proposa kelompok tani ternak.
11. Rekomendasi bantuan tani ternak.
12. Surat keterangan kesehatan ternak (SKKH).
13. Surat izin pengeluaran ternak dari wilayah kabupaten sumbawa.
- 64 14. Pelayanan data dan informasi peternakan dan kesehatan hewan.

Sehingga dalam melaksanakan standar pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dalam Peraturan Menteri Perdayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan mengamanatkan bahwa setiap Daerah wajib untuk menyusun Standar Pelayanan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa.

4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa



4.1.3. Visi dan Misi

a. Visi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbawa Besar memiliki visi dalam meningkatkan kualitas peternakan di Kabupaten Sumbawa Besar adalah *“Terwujudnya Industrialisasi Peternakan Sumbawa yang berdaya Saing, Mandiri Dan Berlandaskan Keluargaan”*.

b. Misi

Misi dari Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak besar, kecil dan unggas.
2. Meningkatkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

3. Mewujudkan kawasan peternakan dalam penyediaan pakan ternak berbasis sumber daya lokal.
4. Mewujudkan peternakan yang berdaulat dalam wadah usaha bersama/kolektif berlandaskan kekeluargaan.
5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui usaha pengolahan hasil peternakan.
6. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan pada bagian ini disimpulkan hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode jenis kualitatif dengan judul penelitian “Pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) Dalam Pendekatan *E-Government* di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa”.

4.2.1. Pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa

Dalam pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (SIJINAK) di dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten sumbawa yang terdapat pada peraturan Bupati Sumbawa Nomor. 52 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Aplikasi Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK), hal ini menjadikan sebuah pelayanan yang baru dalam pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas peternakan di kabupaten sumbawa. Sehingga dalam penerapan Sijinak tersebut untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat (peternak) dalam mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien demi mendukung dan membuat kebijakan pemerintah dalam pelayanan yang berbasis *E-Government*, yang dimana semua lembaga pemerintah di kabupaten sumbawa harus menerapkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi.

Sehingga proses atau layanan dari pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan ini yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sumbawa dapat diakses melalui situs : <http://sijinakhub.sumbawakab.go.id>.

Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) merupakan rumah besar pelayanan pengelolaan ternak di kabupaten sumbawa yang terintegrasi. Dalam Sistem Informasi Jaringan Peternakan ini mengatur beberapa kegiatan dalam mengelola data peternakan yang ada di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

11
a. E- Registrasi dan Kartu Ternak

E-Registrasi dan Kartu Ternak adalah data utama untuk memfasilitasi pelayanan pencatatan pemilik ternak, identitas ternak (tanda sidik + RIFID Tag) yang menjadi basis data populasi ternak dan sebaran dan pencetakan kartu ternak sebagai bukti sah kepemilikan ternak.

b. E- Vaksinasi Ternak

Untuk memfasilitasi pelayanan vaksinasi (SE dan AT) sesuai database ternak di e-registrasi dan pengkartuan ternak dengan memberikan informasi jenis vaksin dan tanggal vaksinasi pada kartu ternak, termasuk vaksinasi rabies hewan peliharaan (anjing + kucing).

c. E- Ijin Perijinan Ternak

11
Untuk memfasilitasi proses pengeluaran ternak potong keluar daerah sesuai prosedur berdasarkan suplay ternak potong dan alokasi kuota pengeluaran ternak potong.

d. E- Pelayanan Kesehatan Hewan (Keswan)

Untuk memfasilitasi proses pelayanan kesehatan hewan (stok obat hewan, identitas ternak yang dilayani, penyakit, enias terapi dan penanganan, petugas yang menangani), laporan situasi penyakit hewan realtime termasuk laporan retribusi pelayanan kesehatan.

e. E- RPH R

Memfasilitasi pelayanan ⁹ pematangan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH), verifikasi dokumen ternak, pemeriksaan antermortem dan postmortem, surat keterangan daging, database RPH, pejalag dan iin pejalag, serta laporan pematangan ternak reguler.

¹¹ f. E- Pasar Ternak

Untuk memfasilitasi jual beli ternak dengan menyediakan informasi pasar data ternak (foto ternak, jenis ternak, umur, berat badan, harga) fungsi ternak (perbibitan, bakalan potong, potong) pemilik, lakosi, termasuk laporan transaksi dan retribusi.

g. E- Bantuan Ternak

Memfasilitasi proses bantuan ternak kepada masyarakat (proposal, verifikasi kelompok penerima, berita acara serah terima, surat pernyataan dll) monitoring dan laporan perkembangan ternak.

h. E- LAR

Untuk memfasilitasi pengembangan budidaya ternak dengan pendekatan LAR dengan menyediakan informasi peta lar (koordinat dan luas), identitas ternak dan pemilik ternak, kelompok pengelola LAR, daya tampung LAR, fasilitas, kondisi ketersediaan pakan.

⁴ Dalam teori George C. Edward III implementasi kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan, dapat dilihat yaitu :

1. Komunikasi

Dapat berupa proses pemberian informasi kepada masyarakat adanya informasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelayanan publik. Kebijakan yang terbaru di ³ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar yaitu Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) untuk mengelola data ternak dan perkembangan peternakan yang di Kabupaten Sumbawa, hal baru bagi masyarakat (peternak) bisa mengakibatkan kesalahfahaman dalam mendapat informasi antara pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. untuk itu mencegah hal itu, seperti yang di katakan oleh bapak Satria Utama, S.Pt, M.Si sebagai Kasubbag Umum dan Perencanaan dan Pelaporan mengemukakan:

“Sistem Jaringan Informasi Peternakan (SIJINAK) merupakan hal baru dalam memperoleh data ternak yang dulunya didata secara manual, hingga untuk komunikasinya kepada masyarakat kami mengadakan sosialisasi terkait cara baru dalam registrasi ternak dengan menggunakan sistem sijnak. Sosialisasi yang telah kami lakukan di beberapa tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa adanya perubahan registrasi data ternak menggunakan sistem sijnak dan juga di respon dengan baik oleh masyarakat”.

Dari hasil wawancara saya di atas terkait dengan komunikasinya, sudah sudah berjalan dengan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat (peternak) itu sendiri. Dalam komunikasi yang ²⁴ dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang masih bertahap di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa yang begitu luas dan masyarakat (peternak) yang masih belum bisa mengerti akan teknologi dari kegunaan dari Sistem Informasi Jaringan Peternakan.

⁴⁵ 2. Sumber Daya

Sumber Daya yaitu berupa sumber daya manusia, anggaran, peralatan dan kewenangan. Untuk menjalankan sebuah implementasi kebijakan membutuhkan

83
hal tersebut agar kebijakan berjalan baik dengan tujuan yang sudah ditentukan,
33
dilihat dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan kabupaten Sumbawa yang terdiri 103 pegawai PNS dan 145 pegawai non
PNS dan untuk anggaran yang digunakan sebesar 50 juta untuk pelaksanaan sistem
Sijinak. seperti di katakan oleh bapak Satria Utama, S.Pt, M.Si sebagai Kasubbag
Umum dan Perencanaan dan Pelaporan mengemukakan:

“Sumber daya manusia dan anggaran lainnya kami sudah terpenuhi untuk bisa melaksanakan sistem sijinak ini, untuk dari segi anggaran yang kami pakai saat berbeda sama tahun kemarin saat melakukan registrasi data ternak secara manual. Sehingga tahun depannya anggaran bisa bertambah agar sistem ini berjalan semestinya karena sistem ini masih bersifat bertahap untuk tujuan yang ingin capai”.

Dari wawancara di atas masalah anggaran yang belum maksimal untuk melaksanakan Sistem Informasi Jaringan Peternakan perlu di perhatikan oleh pemerintah agar kedepannya berjalan dengan baik untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien.

10 3. Disposisi

Disposisi, yaitu sikap atau watak para pelaksana kebijakan untuk menjalankan implementasi kebijakan agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam kebijakan yang baru dilaksanakan meski akan terjadi kesalahpahaman bagi para pelaksana kebijakan tersebut, maka kebijakan sistem sijinak yang di ada 3
Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar yaitu kebijakan yang baru dan berbeda dari tahun sebelumnya dalam mengelola data ternak di kabupaten sumbawa Besar. Seperti yang dikatakan oleh bapak Fery Anggriawan, S.pt. sebagai pegawai sekaligus pelaksana sistem Sijinak, mengemukakan:

60
“Adanya sistem Sijinak ini dapat mempermudah dalam mengelola data ternak hingga data yang sudah kami peroleh dari petugas di lapangan untuk di masukkan ke sistem sijinak yang nanti outputnya berupa kartu ternak. Untuk tanggapan kami adanya sistem sijinak sangat bagus dan proses pelayanannya sudah maksimal”.

Dari wawancara tersebut dilihat sikap pelaksana kebijakan merespon dengan baik adanya Sistem Informasi Jaringan Peternakan dalam pelayanan kepada masyarakat (peternak) agar berjalan secara efektif dan efisien.

³ 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yaitu sebuah pembagian kewenangan dan hubungan antara unit-unit organisasi dalam pengawasan untuk menjalan implementasi kebijakan. Pengawasan yang di lakukan ³ oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa untuk menjalan Sistem Informasi Jaringan Peternakan (Sijinak) sudah berkerjasama dengan Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa Besar dalam keamana data dan menyediakan layanan berupa website untuk mengakses sistem Sijinak. Seperti yang di katakan oleh bapak Satria Utama, S.Pt, M.Si sebagai Kasubbag Umum dan Perencanaan dan Pelaporan mengemukakan:

“Untuk pengawasan dan keamanan data ternak dan pemilik ternak kami sudah berkerjasama dengan dinas kominfotik yang telah mendukung sistem Sijinak dan menyediakan layanan untuk akses sistem Sijinak tersebut dan mendukung program *Smart City Sumbawa* dalam meningkatkan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sumbawa”.

Dari wawancara tersebut, keamanan dan pengawasan dari Sistem Informasi Jaringan Peternakan sudah cukup baik dan adanya program Smart City Sumbawa dapat mendukung pelayanan di kabupaten Sumbawa dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

Dalam menjalankan sebuah kebijakan dari beberapa faktor di atas dalam mendukung atau kegagalan implementasi kebijakan, tentunya partisipasi masyarakat sangatlah mendukung kebijakan- kebijakan yang baru ataupun yang lama tanpa adanya partisipasi masyarakat ⁵ tidak akan berjalan dengan baik karena pelayanan dari pemerintah untuk masyarakat itu sendiri.

Sehingga respon masyarakat (peternak) yang ada di Kabupaten Sumbawa Besar dalam pelayanan untuk mengelola dan meningkatkan potensi peternakan harus didukung sepenuhnya oleh masyarakat itu. Seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Munir, menyatakan:

“Kami sangat merespon dengan baik adanya sistem Sijinak ini untuk mendata ternak karena sistem ini sangat berbeda dari sebelumnya, dan juga sangat efektif dalam mengelola data ternak”.

Dari wawancara diatas, dapat melihat respon masyarakat (peternak) dengan baik sehingga Sistem Informasi Jaringan Peternakan dapat berjalan sukses untuk kedepan dalam mendukung pelayanan bagi masyarakat.

Sehingga dari ⁵⁵ teori George C. Edward III dalam keberhasilan implementasi kebijakan pelaksanaan yang dilakukan oleh Sistem Informasi Jaringan Peternakan dalam mendata peternakan yang ada di Kabupaten Sumbawa dari seluruh wilayahnya yaitu :

Tabel 4.2.2 REKAPITULASI TERNAK RAKYAT DAN PEMERINTAH KATEGORI I & II TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	SAPI BALI	SAPI SUMBAWA	SAPI PERANAKAN	KERBAU SUMBAWA	KUDA SUMBAWA	KAMBING	DOMBA
1	SUMBAWA	4,328	873	-	37	91	986	25
2	UNTER IWES	10,091	708	35	83	54	569	-
3	LAB. BADAS	9,893	453	-	282	36	864	39
4	U T A N	10,330	703	107	70	168	2,737	98
5	R H E E	7,017	70	46	96	37	396	-
6	A L A S	2,573	80	158	139	283	589	32
7	B U E R	4,219	24	132	108	182	482	97
8	ALAS BARAT	6,528	252	496	213	500	845	129
9	BATULANTEH	5,880	78	-	29	207	380	-
10	MOYO HULU	22,711	1,084	103	3,322	740	2,841	-
11	ROPANG	6,267	118	3	129	4,266	-	-
12	LENANGGUAR	5,859	32	-	1,312	823	1,390	-
13	LANTUNG	2,568	184	11	169	1,528	29	-
14	LUNYUK	15,413	136	4	662	806	5,745	-
15	ORONG TELU	4,378	12	32	874	518	1,115	-
16	MOYO HILIR	26,472	1,850	80	4,482	710	677	-
17	MOYO UTARA	8,856	4,573	20	1,196	695	929	-
18	L A P E	10,638	642	628	3,453	183	1,392	-
19	L O P O K	14,485	2,848	989	2,140	1,093	2,109	-
20	PLAMPANG	29,292	704	1,485	1,484	481	2,395	-
21	MARONGE	6,609	380	1,431	2,054	232	405	-
22	LABANGKA	16,845	346	1,164	171	36	167	-
23	EMPANG	9,197	1,163	-	3,870	482	850	51

24	TARANO	5,570	950	-	1,464	227	1,375	209
J U M L A H		246,019	18,263	6,924	27,839	14,378	29,267	680

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa 2021

Dari jumlah data peternak yang sudah masuk 27.675 orang, dari yang jumlah ternak yang sudah teregistrasi sebanyak 177.610 ekor atau 56,6%. Sehingga dilihat dari data tersebut Sistem Informasi Jaringan Peternakan sudah berjalan cukup baik, dari data tersebut sebagian data belum teregistrasi kedalam Sistem Informasi Jaringan Peternakan yang masih bertahap untuk dimasukan di sistem Sijinak dari data ternak di atas. Sehingga kedepannya Sistem Informasi Jaringan Peternakan bisa berjalan dengan baik sepenuhnya dan agar dapat mendukung program *Smart City Sumbawa* dalam pelayanan berbasis teknologi bagi pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa.

Dari outputnya data peternak yang sudah terdaftar dari Sistem Informasi Jaringan Peternakan ini berupa kartu ternak yang memiliki batas kode pada kartunya dan berbeda dari kartu ternak sebelumnya, seperti pada gambar di bawah ini :

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa 2021

Gambar diatas adalah output berupa kartu ternak dari proses pelayanan sijinak yaitu : **E-Registrasi dan Pengkartuan Ternak, E-Izin Pengeluaran Ternak, E-Pelayanan Kesehatan Hewan, E-RPH R, E- Pasar Ternak, E Bantuan Ternak, E-Lar E, E-UPT Prokeswan.**

Sehingga sasaran dalam dalam pelaksanaan Sistem Jaringan Informasi Peternakan (SIJINAK) ini terdapat Peraturan Bupati Sumbawa Nomor. 52 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Ternak
2. Pemilik ternak
3. Pelaku usaha ternak
4. Sarana prasarana

Manfaat dari pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK), yaitu:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelayanan di bidang peternakan.
- 2) Memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan akses informasi di bidang peternakan.
- 3) Mengintegrasikan/memadukan dan menganalisa secara otomatis peternak dan data ternak beserta informasi pengelolaan ternak lainnya kedalam satu sistem aplikasi/web sehingga dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

4.2.3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa

Dalam menerapkan pelayanan yang berbasis teknologi atau bisa dikatakan pelayanan *E-Government* untuk penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada masyarakatnya yang banyak dan daerah yang sangat luas, dan adapun masyarakat yang tidak mengerti mengenai teknologi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyediakan pelayanan yang baru agar tercapainya pelayanan efektif dan efisien, dilihat dari Sistem Informasi Jaringan Peternakan adalah sebuah pelayanan yang baru untuk mengelola data peternakan yang ada di Kabupaten Sumbawa untuk mendukung kualitas peternakan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus mendukung dengan maksimal agar berjalan

dengan baik untuk Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) ini dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk melayani masyarakat (peternak) ke depannya.

Untuk keberhasilan dari Sistem Informasi Jaringan Peternakan pasti memiliki faktor penghambat yang di mana faktor penghambatnya terletak dari ⁷⁶ kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah itu sendiri, seperti komputer dan jaringan dalam mengakses sistem Sistem Informasi Jaringan Peternakan tersebut. Selain faktor tersebut kerjasama antara lembaga lain dalam pengawasan dan keamanan data peternak harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelola data peternakan yaitu ⁹ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkerja sama dengan Dinas Kominfo Sumbawa untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Sehingga demi keberhasilan sistem Sistem Informasi Jaringan Peternakan dalam mendukung *Smart City Sumbawa* tentukan tidak terlepas dari faktor masyarakatnya berupa partisipasi masyarakat harus didukung agar terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat banyak.

4.2.3. Upaya Untuk Mengatasi ⁶ hambatan dalam Pelaksanaa Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa

Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan ⁶ Peternakan (SIJINAK) yang di mana pelaksanaannya memiliki hambatan-hambatan untuk mendapatkan keberhasilan yang optimal, di lihat dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan ini yaitu berupa ⁶⁵ sarana dan prasarana seperti komputer dan jaringan yang masih kurang dan untuk mengakses Sistem Informasi Peternakan memerlukan kualitas sinyal yang bagus. Sehingga ³³ untuk mengatasi hal tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dengan menambah anggaran yang lebih banyak dan juga menyediakan aplikasi offline untuk mengatasi jika terjadi gangguan pada penggunaan jaringan internet. ⁶ Oleh karena itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa upaya mengatasi hal tersebut diperlukan kerjasama antara lembaga-lembaga lain dalam menjamin

5

pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat (peternak) yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan Sistem Informasi jaringan Peternakan (SIJINAK) dukungan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat sangatlah penting demi mencapai pelayanan yang berbasis teknologi dan informasi dan untuk mendukung program *Smart City Sumbawa* agar pelayanan pemerintah Kabupaten Sumbawa yang baik bagi masyarakat demi mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan di ³⁴ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yaitu:

1. Untuk meningkatkan perkembangan peternak dan keamanan data ternak dalam pelayanan bagi masyarakat (peternak) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi belum berjalan secara optimal. Sehingga pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan dengan berbagai kegiatan yaitu e-registrasi ternak, e-vaksinasi ternak, e-ijin pengeluaran ternak, e-pelayanan kesehatan hewan, e-RPH (rumah potong hewan), e-pasar ternak, e-bantuan ternak dan e-LAR.
2. Faktor penghambat dalam terlaksananya Sistem Sijinak berupa komunikasi, sumber daya dan kerjasama dengan lembaga lain untuk keamanan data yang masih kurang dalam pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan demi mencapai pelayanan yang efektif dan efisien.

Sehingga dalam pelaksanaan untuk mengakses Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) ³ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar telah menyediakan sistem yang berbentuk website (<http://sijinakhub.sumbawakab.go.id>.) untuk dapat mengakses data peternak dan pemilik ternak yang ada di Kabupaten Sumbawa Besar.

5.2. Saran

1. Pemerintah hendaknya harus mendukung inovasi pelayanan terbaru dalam melayani masyarakat yang begitu luas dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akan pelayanan terbaru agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendapatkan informasi.
2. ³ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar dalam menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat (peternak) hendaknya selalu terbuka akan informasi pelayanan dengan mengadakan sosialisasi mengenai Sistem Informasi Jaringan Peternakan yang menggunakan teknologi dan masyarakat yang tidak mengerti akan kegunaan sistem Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK)..

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JARINGAN PETERNAKAN (SIJINAK) DALAM PENDEKATAN E-GOVERNMENT Study Kasus: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021

ORIGINALITY REPORT

44%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.ummat.ac.id Internet	1258 words — 13%
2	repository.unhas.ac.id Internet	517 words — 5%
3	repository.ub.ac.id Internet	276 words — 3%
4	www.scribd.com Internet	267 words — 3%
5	id.123dok.com Internet	170 words — 2%
6	es.scribd.com Internet	108 words — 1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet	90 words — 1%
8	M Heru Akhmadi. "EVALUASI DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI E-	88 words — 1%

GOVERNMENT : STUDI KASUS SISTEM APLIKASI KEUANGAN NEGARA", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2017

Crossref

9	123dok.com Internet	71 words — 1%
10	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	66 words — 1%
11	issuu.com Internet	66 words — 1%
12	pt.scribd.com Internet	64 words — 1%
13	digilib.uinsgd.ac.id Internet	63 words — 1%
14	ginungyuri.blogspot.com Internet	55 words — 1%
15	pandeglangkab.go.id Internet	52 words — 1%
16	blog.lapor.go.id Internet	50 words — 1%
17	e-journals.unmul.ac.id Internet	50 words — 1%
18	docplayer.info Internet	46 words — < 1%
19	ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id Internet	44 words — < 1%

20	peraturan.bpk.go.id Internet	40 words — < 1%
21	media.neliti.com Internet	39 words — < 1%
22	ka.unikom.ac.id Internet	36 words — < 1%
23	e-sakip.situbondokab.go.id Internet	35 words — < 1%
24	docobook.com Internet	32 words — < 1%
25	jurnal.unigo.ac.id Internet	32 words — < 1%
26	tajuklombok.com Internet	32 words — < 1%
27	text-id.123dok.com Internet	32 words — < 1%
28	www.slideshare.net Internet	32 words — < 1%
29	digilib.uinsby.ac.id Internet	30 words — < 1%
30	kedokteran.uin-malang.ac.id Internet	26 words — < 1%
31	bapenda.sumbawakab.go.id Internet	24 words — < 1%

repository.unika.ac.id

32	Internet	24 words — < 1%
33	repository.unair.ac.id Internet	23 words — < 1%
34	www.neliti.com Internet	23 words — < 1%
35	journal.unair.ac.id Internet	20 words — < 1%
36	repository.stas.ac.id Internet	18 words — < 1%
37	repository.unisma.ac.id Internet	16 words — < 1%
38	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet	14 words — < 1%
39	fr.scribd.com Internet	13 words — < 1%
40	jurnalinovkebijakan.com Internet	13 words — < 1%
41	repository.uts.ac.id Internet	13 words — < 1%
42	ejournal.uniks.ac.id Internet	12 words — < 1%
43	repositori.usu.ac.id Internet	12 words — < 1%
44	repository.ar-raniry.ac.id	

Internet

12 words — < 1%

45 repository.uinjkt.ac.id

Internet

12 words — < 1%

46 repository.untag-sby.ac.id

Internet

12 words — < 1%

47 repository.fisip-untirta.ac.id

Internet

11 words — < 1%

48 repository.uksw.edu

Internet

11 words — < 1%

49 kc.umn.ac.id

Internet

10 words — < 1%

50 moam.info

Internet

10 words — < 1%

51 repository.uin-malang.ac.id

Internet

10 words — < 1%

52 www.pesisirselatankab.go.id

Internet

10 words — < 1%

53 bettyindahpurnama.blogspot.com

Internet

9 words — < 1%

54 kmkpoa-lan-mks.org

Internet

9 words — < 1%

55 konsultasiskripsi.com

Internet

9 words — < 1%

56 repository.uma.ac.id

Internet

9 words — < 1%

57 repository.usd.ac.id

Internet

9 words — < 1%

58 www.ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id

Internet

9 words — < 1%

59 123456789ismailmahmud.wordpress.com

Internet

8 words — < 1%

60 Wulan Ramdhani, Arizona Firdonsyah. "Personnel Information System Using Microsoft Excel (Case Study: Bima City Health Office)", *Procedia of Engineering and Life Science*, 2021

Crossref

8 words — < 1%

61 adoc.tips

Internet

8 words — < 1%

62 balitbangsdm.kominfo.go.id

Internet

8 words — < 1%

63 destyfauziahramadhani.blogspot.com

Internet

8 words — < 1%

64 ditjennak.pertanian.go.id

Internet

8 words — < 1%

65 e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Internet

8 words — < 1%

66 eprints.ukmc.ac.id

Internet

8 words — < 1%

67 esakip.bangkaikab.go.id

Internet

		8 words — < 1%
68	ojs.uho.ac.id Internet	8 words — < 1%
69	ojs.ukim.ac.id Internet	8 words — < 1%
70	pemerintahan.umm.ac.id Internet	8 words — < 1%
71	peternakan.limapuluhkotakab.go.id Internet	8 words — < 1%
72	ppid.nganjukkab.go.id Internet	8 words — < 1%
73	qdoc.tips Internet	8 words — < 1%
74	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	8 words — < 1%
75	repository.its.ac.id Internet	8 words — < 1%
76	repository.lppm.unila.ac.id Internet	8 words — < 1%
77	search.unikom.ac.id Internet	8 words — < 1%
78	zombiedoc.com Internet	8 words — < 1%
79	eprints.iain-surakarta.ac.id	

Internet

7 words — < 1%

80 jdih.purbalinggakab.go.id
Internet

7 words — < 1%

81 Daman Huri, Denny Hernawan, G. Goris Seran.
"PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA TERHADAP PENEGAKAN DISIPLIN MASYARAKAT DI
KAWASAN UMUM KOTA BOGOR", Jurnal Governansi, 2019
Crossref

6 words — < 1%

82 etheses.uin-malang.ac.id
Internet

6 words — < 1%

83 repository.radenintan.ac.id
Internet

6 words — < 1%

84 www.kompasiana.com
Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF